

WACANA

BERNAS JOGJA

Senin Wage, 29 Juni 201

HALAMAN

Historiografi Korupsi dan Revisi UU KPK

Bagian Terakhir
dari Dua Tulisan

Oleh: Hendra Kurniawan

PADA masa Jepang, negeri ini menyandang status dengan tingkat penderitaan rakyat yang begitu tinggi, inflasi terus terjadi, dan pasar gelap merambah. Ini kemudian berujung pada usaha pemenuhan kebutuhan melalui jalan pintas yaitu korupsi.

Inefisiensi anggaran dan perilaku korupsi yang tumbuh dan berkembang pada masa kolonialisme di Indonesia ternyata berdampak lanjutan. Pemerintahan yang baru lahir tahun 1945 pada dekade tahun 1950-an mulai dihadapkan dengan berbagai kemelut persoalan korupsi dan penyelewengan dana. Dalam kondisi yang masih serba susah ternyata ada juga pihak-pihak tertentu yang

tega mengedepankan kepentingan dan perutnya sendiri. Perilaku ini semakin "matang" pada masa Orde Baru. Sekarang semangat anti korupsi memang kuat gaungnya, namun dukungan masyarakat dan perbaikan mental para pejabat termasuk aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Langkah mundur

Panjangnya sejarah korupsi ternyata tak sepadan dengan sejarah pemberantasan korupsi. Menjadi lebih ironis lagi jika kemudian secara berturut-turut dihadapkan dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kriminalisasi terhadap para vokalis anti korupsi, dan kini ditambah rencana revisi UU KPK. Ini merupakan kemunduran

yang serius. Seruan revolusi mental terancam mandul jika para pejabat dan aparat penegak hukum tidak berani menolak korupsi. Persoalan korupsi dan upaya pemberantasannya merupakan masalah mentalitas individu yang kembali pada hati nurani masing-masing.

Di sisi lain tampaknya sudah menjadi kebutuhan akan adanya sebuah historiografi (penulisan sejarah) korupsi sebagai bahan rujukan. Historiografi korupsi diperlukan untuk benar-benar menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi sejak dulu sudah menjadi penyakit yang mematikan. Para penyelenggara negara perlu mempelajari baik-baik sejarah korupsi di negeri ini agar dapat merumuskan upaya pembe-

rantasannya yang efektif.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat menggunakan pendekatan yang tidak hanya berkaitan dengan soal moral namun juga keilmuan. Menyitir Tullius Cicero, *Historia Magistra Vitae*, sejarah adalah guru kehidupan. Artinya sejarah menawarkan ajakan agar manusia dapat bertindak bijaksana dengan bercermin pada masa lampau. Jika ajakan ini dapat diterima dengan baik maka ke depan tidak perlu lagi muncul wacana-wacana yang kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi. Melalui historiografi korupsi upaya pemberantasan korupsi ini bisa dapat ditegakkan tanpa sedikit pun keragu-raguan! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.